

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk menilai kinerja perekonomian, terutama untuk menganalisis capaian pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan aktivitas ekonomi dalam menciptakan tambahan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu (Sabyan & Widyanti, 2022). Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat ketika pendapatan perkapita meningkat, yang memberikan lebih banyak alternatif dalam mengonsumsi barang dan jasa serta diikuti dengan meningkatnya daya beli masyarakat (Regina, 2022).

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Pada sisi pendapatan ditentukan dengan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam usaha perekonomian sedangkan dari sisi pengeluaran terlihat pada sisi konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan perdagangan internasional. Dalam pendekatan pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Daroen et al., 2024). Peran tersebut menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya menjadi bagian dari struktur PDB,

tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi nasional. Di Indonesia, dinamika konsumsi rumah tangga turut menentukan stabilitas dan fluktuasi kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu (Alhudori, 2018). Untuk memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan Produk Domestik Bruto dan kontribusi konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDB, berikut disajikan data terkait dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1 [Seri 2010] PDB Indonesia menurut Pengeluaran ADHK (Miliar Rupiah)

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.780,2	5.896,7	6.187,9	6.486,3	6.806,4
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	130,3	132,4	139,9	153,9	173,1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	874,1	911,3	871,0	897,3	956,6
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.419,2	3.549,2	3.686,6	3.825,2	4.001,7
5. Perubahan Inventori	51,3	62,7	70,7	127,7	246,7
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.083,9	2.458,8	2.858,0	2.896,4	3.085,1
7. Impor Barang dan Jasa	1.686,0	2.458,8	2.858,0	2.896,4	2.571,4
8. Diskrepansi Statistik	70,0	214,1	316,9	296,7	222,1
PDB	10.723,0	11.120,1	11.710,2	12.301,5	12.920,3

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2024, Indonesia (diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai PDB menurut pengeluaran ADHK (Atas Dasar Harga Konstan), tabel tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia selama periode 2020-2024. Lebih dari separuh PDB setiap tahun berasal dari komponen ini. Dalam lima tahun terakhir, kontribusinya rata-rata mencapai sekitar

53% terhadap total PDB. Hal ini menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki peran dominan dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Hal ini sejalan dengan kondisi Indonesia sebagai negara berpenduduk besar. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNCTAD (*The United Nations Conference on Trade and Development*), Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang berdampak pada meningkatnya permintaan serta perubahan pola konsumsi masyarakat seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi (Sugiyanto et al., 2022). Kondisi tersebut penting diperhatikan karena dalam kerangka Keynesian yang menyatakan pengeluaran konsumsi rumah tangga berperan dalam membentuk permintaan agregat dan aktivitas ekonomi, terutama dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, konsumsi berkontribusi terhadap peningkatan permintaan agregat yang mendorong produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan. Selanjutnya, peningkatan pendapatan dapat meningkatkan konsumsi sehingga output dan pertumbuhan ekonomi meningkat (Afrizal et al., 2021). Selain itu, dalam pendekatan Keynes, konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan disposabel, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.

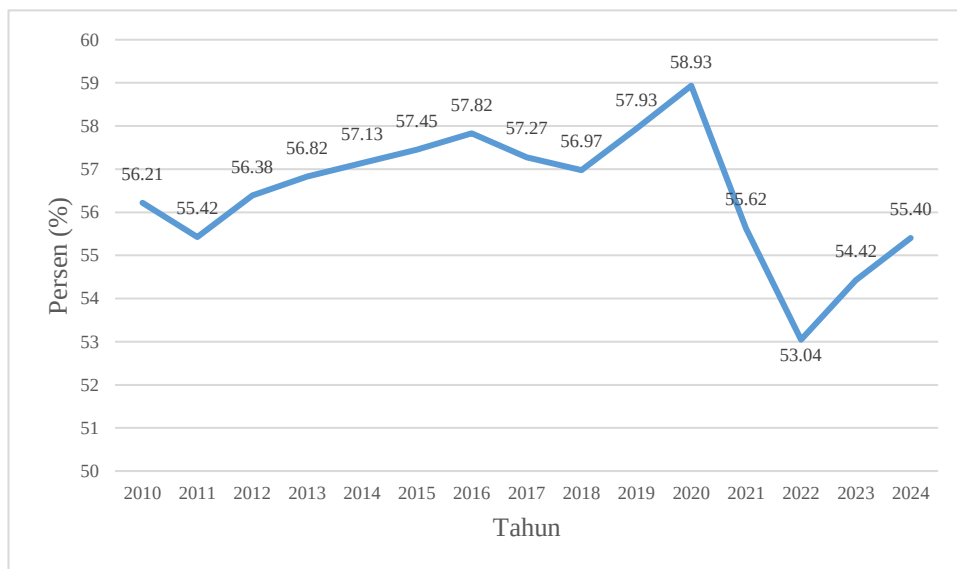
Oleh karena itu, konsumsi rumah tangga perlu diperhatikan karena sebagian besar aktivitas konsumsi terjadi melalui pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga berperan dalam pemenuhan kebutuhan anggota keluarganya melalui kegiatan belanja untuk berbagai keperluan selama satu tahun, yang dikenal sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pendapatan yang diperoleh masyarakat pada

umumnya dialokasikan untuk membeli kebutuhan primer, sekunder, dan tersier lainnya. Oleh karena itu konsumsi dapat dikatakan sebagai aktivitas membeli barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan dan memenuhi keinginan menggunakan suatu barang (Nailufar et al., 2022).

Dalam kegiatan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi, yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Tingkat konsumsi masyarakat dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah, serta dapat memiliki peran penting dalam memengaruhi dinamika perekonomian suatu negara (Ningsih et al., 2020). Kenaikan konsumsi masyarakat mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Ketika permintaan tersebut meningkat, produsen akan menambah jumlah produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Untuk memproduksi lebih banyak, produsen membutuhkan tambahan tenaga kerja. Sehingga, dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga bisa membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsumsi rumah tangga juga berperan penting dalam kesejahteraan. Keluarga dapat mencapai kesejahteraan yang tinggi dengan mengatur pengeluarannya dengan efektif dan efisien sesuai kebutuhan (Supartawan & Saskara, 2021).

Mengingat konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, maka penting untuk melihat bagaimana perkembangan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai peran konsumsi rumah tangga dalam menopang perekonomian Indonesia

serta perubahan kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi nasional. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, berikut disajikan perkembangan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB Indonesia periode 2010–2024.



Sumber: World Bank 2025 (diolah kembali)

Gambar 1.1 Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDB Tahun 2010-2024 (Persen)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama periode 2010–2024 mengalami fluktuasi. Pada periode 2010 hingga 2016, kontribusi konsumsi rumah tangga cenderung meningkat secara bertahap. Kondisi ini mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif stabil serta aktivitas ekonomi domestik yang terus berkembang. Meskipun demikian, pada tahun 2011 terjadi penurunan yang dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat krisis utang di kawasan Eropa dan kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang menekan prospek pertumbuhan ekonomi dunia (Bank Indonesia, 2025).

Penurunan terjadi kembali di tahun 2018 karena volatilitas global. Laporan *World Bank* mencatat bahwa konsumsi swasta mengalami pelemahan tipis sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi aktivitas ekonomi domestik (World Bank, 2018). Selanjutnya, pada tahun 2020 kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 58,93 persen, merupakan tingkat tertinggi selama periode pengamatan. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan meningkatnya konsumsi masyarakat, melainkan juga disebabkan oleh kontraksi yang lebih dalam pada komponen PDB lainnya, seperti investasi dan ekspor, akibat pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021 hingga 2022, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB kembali mengalami penurunan menjadi 55,62 persen dan 53,04 persen. Penurunan tersebut menunjukkan adanya proses penyesuaian perekonomian pascapandemi yang disertai dengan tekanan inflasi serta ketidakpastian ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Selanjutnya, pada periode 2023 hingga 2024 kontribusi konsumsi rumah tangga kembali meningkat menjadi 54,42 persen dan 55,40 persen, yang menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi domestik. Meskipun demikian, kontribusi tersebut masih berada di bawah tingkat sebelum pandemi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB menunjukkan adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi, baik yang berasal dari faktor domestik maupun global. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia, (2022). menyatakan bahwa tingginya ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap konsumsi domestik

menyebabkan konsumsi rumah tangga rentan terhadap berbagai guncangan, seperti lonjakan harga komoditas global, krisis keuangan internasional, maupun ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, stabilitas konsumsi rumah tangga perlu dijaga secara berkelanjutan mengingat konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia dengan kontribusi rata-rata sekitar 53 persen. Apabila konsumsi rumah tangga mengalami penurunan secara berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat karena berkurangnya kontribusi konsumsi terhadap PDB.

Selain itu, konsumsi juga dipengaruhi oleh pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dalam model konsumsi Keynesian, menyatakan bahwa pendapatan disposabel menentukan besarnya konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, perubahan kebijakan pajak akan berdampak pada daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi agregat (Hidayat, 2026). Pajak Penghasilan (PPh), sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar dalam APBN, secara langsung memengaruhi pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh rumah tangga (Budiman & Gumawang, 2025).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada individu maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apapun (Fitri et al., 2025). PPh menerapkan prinsip tarif progresif, pajak ini dibuat untuk meningkatkan keadilan fiskal, di mana semakin tinggi penghasilan, semakin besar kontribusi pajak yang diwajibkan

(Melvyn et al., 2025). Sebagai pajak langsung, PPh memengaruhi konsumsi melalui perubahan pendapatan disposabel secara bertahap. Kenaikan tarif PPh dapat mengurangi pendapatan setelah pajak, yang pada akhirnya menekan pengeluaran konsumsi. Dampak tersebut umumnya terjadi dalam jangka menengah hingga panjang karena rumah tangga cenderung berusaha mempertahankan tingkat konsumsinya sebelum melakukan penyesuaian (Hidayat, 2026).

Menurut Balasoiu et al., (2023), pajak penghasilan memberikan pengaruh langsung terhadap konsumsi rumah tangga karena kenaikan pajak akan mengurangi pendapatan disposabel yang tersedia untuk dibelanjakan. Penurunan pendapatan setelah membayar pajak tersebut menyebabkan menurunnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga memengaruhi permintaan agregat.

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Pajak Dalam Negeri					
(1) Pajak Penghasilan	594.033,33	696.676,60	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450.328,06	551.900,50	687.609,50	742.264,50	811.365,00
(3) Pajak Bumi dan Bangunan	20.953,61	18.924,80	23.264,70	25.462,70	27.182,20
(4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
(5) Cukai	176.309,31	195.517,80	226.880,80	227.210,00	246.079,40
(6) Pajak Lainnya	6.790,79	11.126,00	7.686,10	9.714,40	10.549,00
b. Pajak Perdagangan Internasional					
(1) Bea Masuk	32.443,50	39.122,70	51.077,70	53.094,00	57.372,50
(2) Pajak Ekspor	4.277,71	34.572,70	39.819,90	19.804,00	17.528,00
Total Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2024, Indonesia (diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan realisasi penerimaan perpajakan Indonesia periode 2020-2024, struktur penerimaan negara didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM). Selama periode tersebut, PPh secara konsisten menjadi penyumbang terbesar penerimaan perpajakan dengan kontribusi rata-rata sekitar 47,76% terhadap total penerimaan perpajakan. Sementara itu, PPN dan PPnBM menempati posisi kedua dengan kontribusi rata-rata sekitar 34,94%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari total penerimaan perpajakan berasal dari pajak atas konsumsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan sangat bergantung pada dua jenis pajak utama tersebut, di mana PPh menjadi kontributor terbesar dan PPN menjadi penopang utama kedua dalam pembiayaan negara.

Berbeda dengan PPh yang memengaruhi konsumsi melalui perubahan pendapatan disposabel, PPN memengaruhi konsumsi melalui mekanisme harga. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengumutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa atau lebih dikenal pajak atas konsumsi (*tax on consumption*) oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada prinsipnya, setiap barang dan jasa dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras (Romana et al., 2023). Sebagai pajak yang umum ditemui dalam aktivitas ekonomi sehari-hari dan dikenakan secara proporsional pada setiap transaksi domestik, PPN berpotensi memengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Namun,

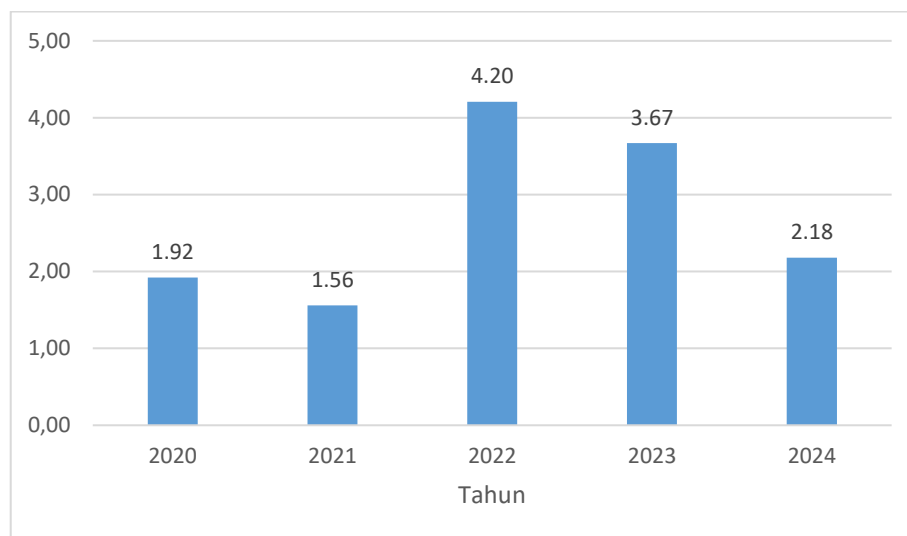
karakteristiknya yang cenderung regresif menimbulkan kekhawatiran terhadap kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah (Sangkala, 2025).

Seiring dengan dinamika perekonomian global dan domestik, pemerintah Indonesia melakukan berbagai reformasi perpajakan, termasuk kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan regulasi yang disahkan pada tahun 2023, tarif PPN dinaikkan secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2023, serta direncanakan kembali meningkat menjadi 12% pada tahun 2025. Implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baru dalam perekonomian, khususnya terhadap daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada pola dan tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kelompok rumah tangga berpendapatan rendah diperkirakan mengalami dampak yang lebih besar, karena sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Kondisi ini dapat mendorong penyesuaian perilaku konsumsi, seperti pengurangan jumlah konsumsi, pergeseran ke barang substitusi yang lebih murah, maupun penundaan pembelian barang dan jasa non-prioritas. Dalam jangka panjang, penurunan konsumsi tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi (Subur & Syata, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Hajatina & Hasanah (2024), menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan tarif PPN mendorong peningkatan harga barang dan jasa karena beban pajak tersebut pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Dampak tersebut lebih besar dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah, sehingga berpotensi menurunkan kemampuan konsumsi mereka. Sebaliknya,

penelitian Puteri et al., (2025) menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsumsi. Meskipun secara umum tarif PPN yang tinggi dapat meningkatkan harga dan menekan konsumsi, dalam penelitian tersebut pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik untuk dinyatakan signifikan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan harga barang dan jasa, terutama dalam konteks inflasi di suatu wilayah (Nailufar et al., 2022a). Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga, dengan adanya inflasi yang terus menerus konsumsi akan menurun. Kondisi ini sejalan dengan teori hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga meningkat, jumlah barang yang diminta cenderung menurun (*ceteris paribus*). Oleh karena itu, kenaikan inflasi berpotensi menekan tingkat konsumsi rumah tangga karena masyarakat perlu menyesuaikan pola pengeluarannya terhadap perubahan harga.



Sumber: World Bank 2020-2024, Indonesia (diolah kembali)

Gambar 1. 2 Inflasi Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.2 pada tahun 2022 inflasi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan bahkan menjadi tingkat inflasi tertinggi dari lima tahun terakhir dibawah 5 persen yaitu sebesar 4,20 persen. Menurut kepala badan busat statistik, peningkatan inflasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain gangguan sisi pasokan yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemi COVID-19 serta kondisi geopolitik global yang menekan distribusi energi dan mendorong kenaikan harga di banyak negara, termasuk negara berkembang, yang kemudian diikuti pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga. Dalam konteks rumah tangga, kenaikan inflasi cenderung menurunkan daya beli sehingga dapat menekan konsumsi, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah yang proporsi belanjanya didominasi kebutuhan pokok. Kenaikan inflasi tidak hanya menekan daya beli, tetapi juga dapat meningkatkan ketidakpastian harga yang dihadapi rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian Fischer et al., (2024) yang

menyatakan bahwa ketidakpastian inflasi memengaruhi perilaku rumah tangga dan dapat mendorong penyesuaian pengeluaran konsumsi.

Penelitian yang dilakukan Yudanto & Rochaida, (2020), menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga, baik untuk kelompok makanan maupun non-makanan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan inflasi cenderung menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga secara nyata. Namun, temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Murwiati & Zulkarnain, (2023), yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Artinya, perubahan tingkat inflasi dalam penelitian tersebut tidak terbukti secara statistik memengaruhi perubahan konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan fenomena yang ada, konsumsi rumah tangga di Indonesia cenderung rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi, baik yang berasal dari faktor domestik maupun eksternal. Di sisi lain, struktur penerimaan negara masih didominasi oleh sektor perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat. Sementara itu, tingkat inflasi menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan kenaikan dan penurunan yang tidak stabil, sehingga turut memengaruhi kemampuan konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, kajian empiris yang secara khusus membahas pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) terhadap konsumsi rumah tangga masih relatif terbatas. Kondisi tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pajak dan Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia Tahun 1993-2024”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan inflasi terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pajak penghasilan (PPh) terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Menganalisis pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik dari sisi akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan memperdalam kajian ilmiah mengenai pengaruh Pajak Penghasilan, inflasi, dan pendapatan per kapita terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keterkaitan variabel fiskal dan makroekonomi terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai penerapan teori ekonomi makro, khususnya terkait pengaruh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan inflasi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga.
2. Bagi Pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan peneliti selanjutnya, yang tertarik mengkaji topik konsumsi rumah tangga, kebijakan fiskal, dan variabel makroekonomi di Indonesia, serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitian sejenis di masa mendatang.
3. Bagi Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan ekonomi makro, khususnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pengendalian inflasi guna mendorong stabilitas dan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Bagi Universitas Siliwangi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi Universitas Siliwangi, khususnya dalam memperkaya khasanah penelitian di bidang ekonomi pembangunan dan

ekonomi makro, serta menjadi referensi akademik bagi civitas akademika dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia, dengan cakupan wilayah secara nasional. Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu (*time series*) yang mempresentasikan kondisi perekonomian Indonesia selama periode tahun 1993-2024. Data diperoleh dari lembaga resmi yaitu *World Bank*, Badan Pusat Statistik (BPS), dan sumber terkait lainnya yang relevan dengan variabel penelitian.

